



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



**PERKEMBANGAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN SERTA EVALUASI PENYERAPAN
BELANJA PEMERINTAH SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017**

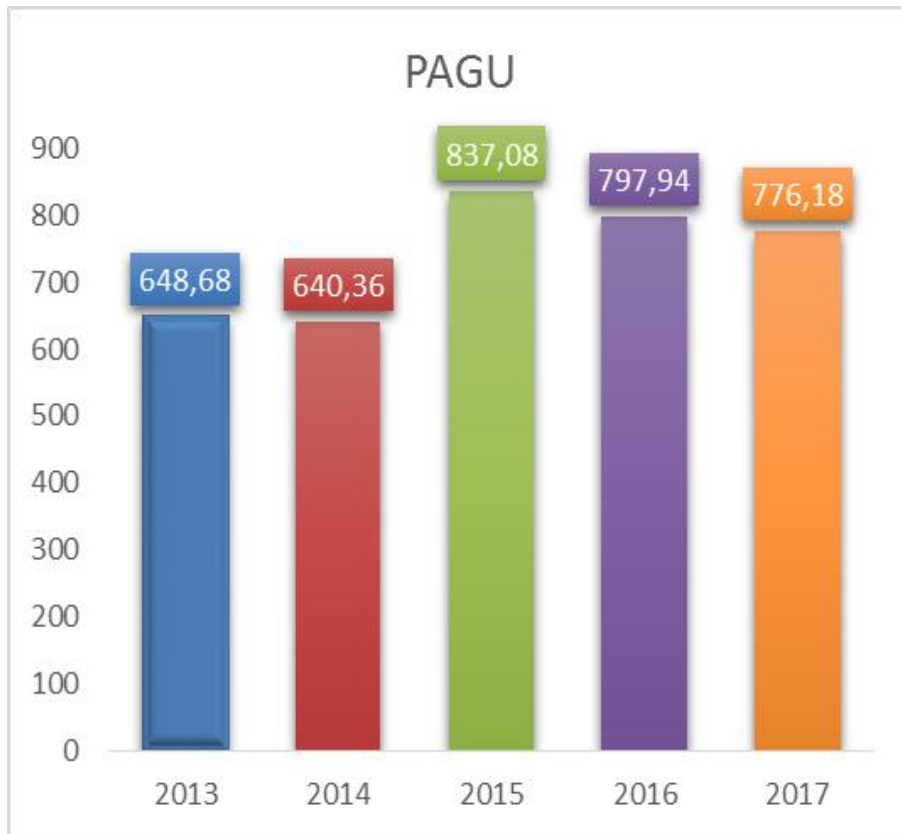


Jakarta, Juli 2017

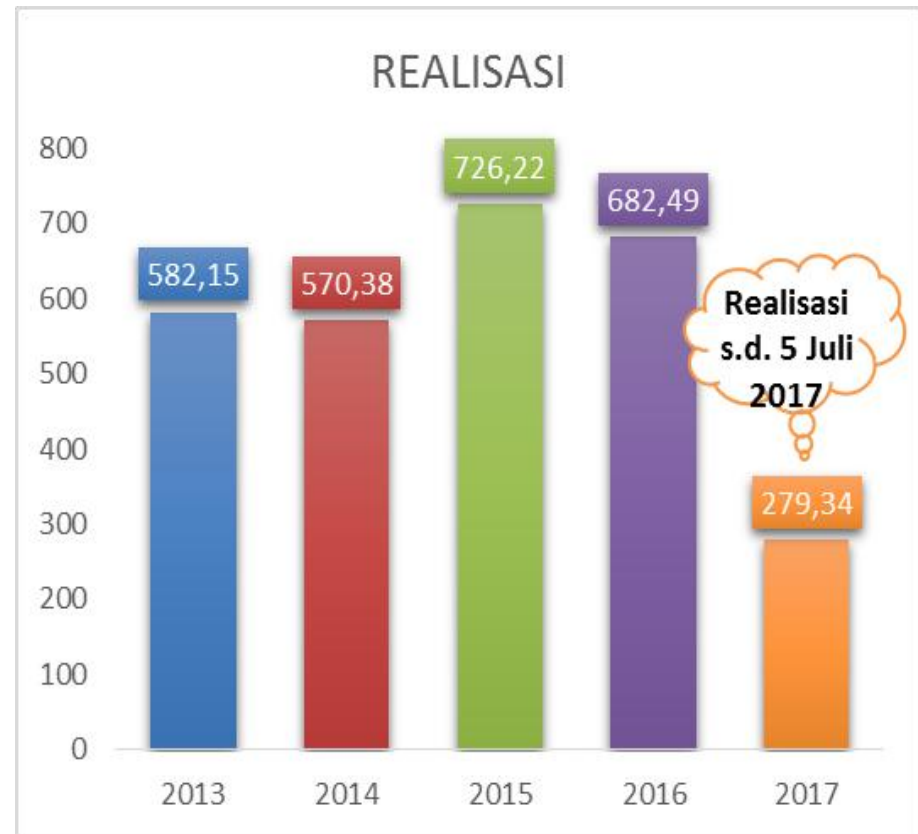
PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2014 S/D 2017

PROPORSI PAGU DAN REALISASI K/L PER TAHUN

Proporsi Pagu K/L (Triliun Rupiah)



Proporsi Realisasi K/L (Triliun Rupiah)



Total realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) pada triwulan III per 5 Juli 2017 tercatat Rp279,34 triliun, atau 35,99 persen dari total pagu belanja K/L dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, yang sebesar Rp776,18 triliun.

Realisasi anggaran per tahun dan sampai dengan 30 Juni

PENYERAPAN ANGGARAN 10 K/L PAGU TERTINGGI

(Data s.d. 5 Juli 2017, dalam Milyar)

NO	NMDEPT	KDGBKPK	PAGU	REALISASI	%
1	KEMENTERIAN PERTAHANAN	'51	41.148,99	22.306,79	54,21%
		'52	34.478,03	13.623,80	39,51%
		'53	32.497,40	6.976,98	21,47%
			108.124,42	42.907,57	39,68%
2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	'51	2.769,89	1.092,15	39,43%
		'52	22.894,07	6.600,37	28,83%
		'53	79.086,28	23.456,14	29,66%
			104.750,24	31.148,66	29,74%
3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	'51	43.250,06	22.162,82	51,24%
		'52	19.195,04	6.548,00	34,11%
		'53	22.193,70	5.474,81	24,67%
			84.638,80	34.185,63	40,39%
4	KEMENTERIAN AGAMA	'51	37.321,83	16.424,05	44,01%
		'52	17.476,04	6.906,37	39,52%
		'53	4.006,37	799,23	19,95%
		'57	1.488,01	318,58	21,41%
			60.292,25	24.448,23	40,55%
5	KEMENTERIAN KESEHATAN	'51	7.015,49	2.714,67	38,70%
		'52	23.582,06	7.707,15	32,68%
		'53	3.470,84	445,32	12,83%
		'57	25.502,40	12.685,04	49,74%
			59.570,79	23.552,18	39,54%
6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	'51	3.842,51	1.583,87	41,22%
		'52	14.067,41	3.693,65	26,26%
		'53	28.209,49	7.417,37	26,29%
			46.119,41	12.694,89	27,53%

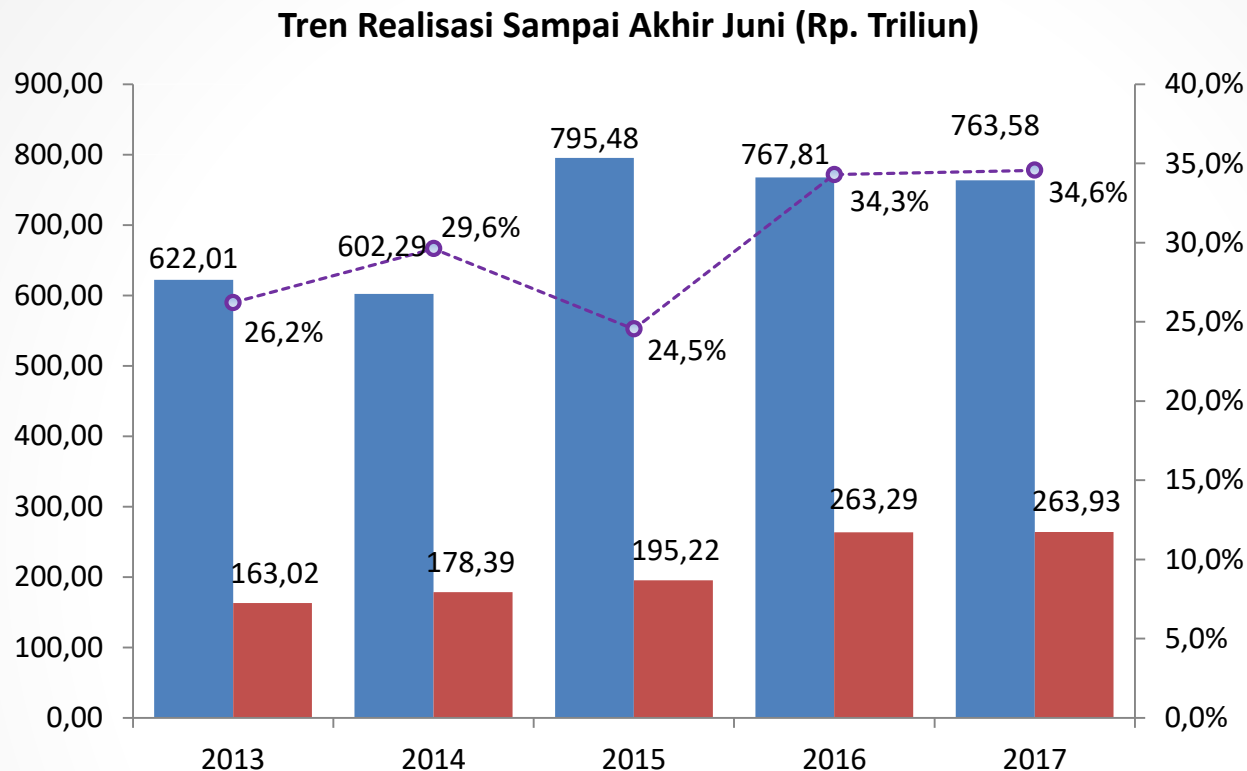
PENYERAPAN ANGGARAN 10 K/L PAGU TERTINGGI

(Data s.d. 30 Juni 2017, dalam Milyar)

NO	NMDEPT	KDGBKPK	PAGU	REALISASI	%
7	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	'51	14.116,25	6.852,93	48,55%
		'52	19.969,02	6.133,50	30,72%
		'53	4.240,19	346,37	8,17%
		'57	3.476,63	1.644,31	47,30%
			41.802,09	14.977,11	35,83%
8	KEMENTERIAN KEUANGAN	'51	17.711,61	8.715,77	49,21%
		'52	21.923,03	10.764,31	49,10%
		'53	1.261,35	176,14	13,96%
			40.895,99	19.656,22	48,06%
9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	'51	7.939,50	3.815,80	48,06%
		'52	21.333,98	6.526,70	30,59%
		'53	1.285,62	154,40	12,01%
		'57	9.288,50	4.427,08	47,66%
			39.847,60	14.923,98	37,45%
10	KEMENTERIAN PERTANIAN	'51	2.246,64	1.098,32	48,89%
		'52	19.439,14	7.248,63	37,29%
		'53	426,90	149,11	34,93%
			22.112,68	8.496,06	38,42%

10 K/L dengan pagu tertinggi dianggap cukup mewakili dan mempunyai peran yang signifikan mengingat 10 K/L tersebut mempunyai pagu total Rp 608,15 Trilyun (78,35%) dari keseluruhan pagu belanja K/L sebesar Rp 776,18 Trilyun. Sampai dengan 30 Juni 2017, realisasi 10 K/L pagu tertinggi mencapai Rp 226,99 Trilyun (37,32%).

REALISASI BELANJA NEGARA SEMESTER I – 2017



Tingkat realisasi belanja K/L sampai tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp 263,93 triliun atau 34,6% dari pagu APBN 2017 sebesar Rp 763,58 triliun. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, tingkat realisasi anggaran tahun 2017 tersebut tercatat sebagai capaian tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Walaupun melambat di 2015, sejak tahun 2013 tingkat realisasi anggaran belanja K/L relatif meningkat. Hal ini menunjukkan tren kinerja penyerapan anggaran K/L yang positif atau semakin membaik, sehingga diharapkan peran belanja pemerintah sebagai pendorong perekonomian semakin optimal sejak awal tahun anggaran

REALISASI BELANJA NEGARA SEMESTER I – 2017

A. Realisasi menurut Jenis Belanja

Pagu dan Realisasi Belanja K/L Semester I Tahun 2016 dan 2017

No.	JENIS BELANJA	APBN 2017 (Rp.Triliun)			APBNP 2016 (Rp.Triliun)		
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	51 - PEGAWAI	220,2	93,6	42,5%	209,1	101,0	48,3 %
2	52 - BARANG	296,2	97,1	32,8%	302,8	94,8	31,3 %
3	53 - MODAL	194,3	47,5	24,4%	206,6	44,4	21,5 %
4	57 - BANSOS	53,0	25,7	48,5%	49,4	23,1	46,7 %
	TOTAL	763,6	263,9	34,6%	767,8	263,3	34,3 %

Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi anggaran belanja K/L periode Semester I 2017 adalah realisasi THR dan Pensiun 13 di bulan Juni 2017 pada Belanja Pegawai, implementasi penyederhanaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penyaluran bantuan pemerintah pada Belanja Barang, lelang sebelum tahun anggaran 2017 dan pembayaran kontrak 2016 yang telah selesai namun dibayar di tahun 2017 pada Belanja Modal, serta pencairan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Belanja Bansos

A. Realisasi menurut Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Menurut Kelompok Akun (BKPK)

No	Kelompok Akun	Pagu (Rp.Juta)*	Realisasi (Rp.Juta)	%
1	5111 - Bel. Gaji dan Tunj. PNS	90.498.141,0	40.181.365,6	44,4%
2	5124 - Bel. Tunj. Khusus dan Bel. Pegawai Transito	60.649.027,3	22.047.700,5	36,4%
3	5112 - Bel. Gaji dan Tunj. TNI/Polri	55.733.631,9	27.474.144,9	49,3%
4	5115 - Bel. Gaji dan Tunj. Pegawai Non PNS	7.664.479,0	2.486.347,2	32,4%
5	5121 - Bel. Honorarium	2.467.129,8	629.880,1	25,5%
6	5122 - Bel. Lembur	1.059.377,8	265.334,5	25,0%
7	5113 - Bel. Gaji dan Tunj. Pejabat Negara	662.373,8	272.415,5	41,1%
8	5114 - Bel. Gaji Dokter PTT	438.768,3	261.372,7	59,6%
9	5132 - Bel. Program Jaminan Sosial Pegawai	345,6	0	0%
JUMLAH TOTAL		219.173.274,5	93.618.560,9	42,7%

Dari sisi penyerapan, secara nominal realisasi terbesar dicatat oleh Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yaitu sebesar Rp40,2 triliun atau mencapai 42,9% dari total realisasi belanja pegawai yang sebesar Rp93,6 triliun. Realisasi terbesar berikutnya dicatat oleh Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri serta Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito yaitu masing-masing sebesar Rp27,5 triliun dan Rp22,0 triliun. Secara persentase, tingkat realisasi tertinggi dicatat oleh Belanja Gaji Dokter PTT (5114) yaitu 59,6% dari pagu Rp438,7 miliar atau Rp261,4 miliar

REALISASI BELANJA NEGARA SEMESTER I – 2017

A. Realisasi menurut Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Menurut Bagian Anggaran (K/L)

No	K/L	Pagu (Rp.Juta)*	Realisasi (Rp.Juta)	%
1	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.250.060,6	19.268.290,3	44,6%
2	KEMENTERIAN PERTAHANAN	41.148.986,7	18.723.340,2	45,5%
3	KEMENTERIAN AGAMA	37.321.365,9	15.030.230,8	40,3%
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	17.711.102,3	7.612.901,9	43,0%
5	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	14.116.252,0	6.021.825,2	42,7%
6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.939.452,1	3.545.553,6	44,7%
7	KEMENTERIAN KESEHATAN	7.015.491,2	2.385.759,7	34,0%
8	MAHKAMAH AGUNG	6.299.907,4	2.863.974,3	45,5%
9	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	4.451.373,3	2.006.394,8	45,1%
10	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.842.511,9	1.381.185,8	35,9%
11	75 K/L lainnya	36.076.771,1	14.779.104,2	41,0%
JUMLAH TOTAL		219.173.274,5	93.618.560,9	42,7%

K/L dengan nominal realisasi belanja pegawai terbesar adalah POLRI, Kemhan dan Kemenag. Realisasi belanja pegawai POLRI sebesar Rp19,3 triliun, Kemenhan sebesar Rp18,7 triliun dan Kemenag Rp15,0 triliun. Total realisasi belanja pegawai ketiga K/L tersebut mencapai Rp53,0 triliun atau 56,6% dari total realisasi belanja pegawai.

Realisasi belanja pegawai terutama digunakan untuk membayar gaji personil TNI/POLRI dan pegawai PNS, uang lauk pauk, dan tunjangan kinerja. Selain adanya realisasi THR dan Pensiun 13 pada bulan Juni 2017, tingginya realisasi belanja pegawai juga didorong oleh kondisi pada beberapa K/L yang mengalami kenaikan tunjangan kinerja di tahun 2016 tetapi belum sempat dibayarkan sehingga baru direalisasikan di tahun anggaran 2017

REALISASI BELANJA NEGARA SEMESTER I – 2017

A. Realisasi menurut Jenis Belanja

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Menurut Kelompok Akun (BKPK)

No	Kelompok Akun	Pagu (Rp.Juta)*	Realisasi (Rp.Juta)	%
1	5212 - Bel. Barang Non Operasional	61.106.507,7	19.579.360,8	32,0%
2	5231 - Bel. Pemeliharaan	37.129.176,5	13.422.017,8	36,1%
3	5211 - Bel. Barang Operasional	36.598.258,3	14.089.424,3	38,5%
4	5251 - Bel. Barang BLU	36.273.375,1	14.901.775,9	41,1%
5	5241 - Bel. Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.521.544,7	11.272.006,6	32,7%
6	5221 - Bel. Jasa	32.901.005,7	8.498.908,4	25,8%
7	5261 - Bel. Barang utk diserahkan kpd Masy./Pemda	26.942.726,3	6.003.483,9	22,3%
8	5263 - Bel. Barang lainnya utk diserahkan kpd Masy./Pemda	19.664.219,9	4.262.494,9	21,7%
9	5218 - Bel. Barang Persediaan	13.597.271,7	4.289.025,0	31,5%
10	5242 - Bel. Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.390.583,0	948.987,9	28,0%
11	5262 - Bel. Barang Penunjang Dana Dekon dan TP utk diserahkan kpd Pemda	31.993,4	3.125,7	9,8%
12	5215 - Bel. Barang Pengganti Pajak Dlm Rangka Hibah MCC	10.204,5	3.282,8	32,2%
13	5217 - Bel. Kontribusi	249,8	18,5	7,4%
JUMLAH TOTAL		302.167.116,7	97.273.912,5	32,2%

Dari sisi penyerapan, secara nominal realisasi terbesar dicatat oleh Belanja Barang Non Operasional yaitu sebesar Rp19,6 triliun atau 20,1% dari total realisasi belanja barang yang sebesar Rp97,3 triliun. Nominal realisasi terbesar berikutnya dicatat oleh Belanja Barang BLU sebesar Rp14,9 triliun, Belanja Barang Operasional sebesar Rp14,1 triliun, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp13,4 triliun dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp11,3 triliun. Secara persentase, tingkat realisasi tertinggi dicatat oleh Belanja Barang BLU yaitu 41,4% dari pagu Rp36,3 triliun dan Belanja Barang Operasional yaitu 38,5% dari pagu Rp36,6 triliun.

REALISASI BELANJA NEGARA SEMESTER I – 2017

A. Realisasi menurut Jenis Belanja

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Menurut Bagian Anggaran (K/L)

No	K/L	Pagu (Rp.Juta)*	Realisasi (Rp.Juta)	%
1	KEMENTERIAN PERTAHANAN	34.478.026,7	13.587.917,0	39,4%
2	KEMENTERIAN KESEHATAN	23.582.165,8	7.485.750,6	31,7%
3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	22.885.697,1	6.491.567,7	28,4%
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	21.924.047,0	10.699.738,3	48,8%
5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21.334.657,3	6.447.750,6	30,2%
6	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	19.960.882,3	6.061.210,6	30,4%
7	KEMENTERIAN PERTANIAN	19.439.179,4	7.113.956,2	36,6%
8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	19.172.663,0	6.455.889,9	33,7%
9	KEMENTERIAN AGAMA	17.476.400,2	6.838.405,2	39,1%
10	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	14.067.410,6	3.642.212,9	25,9%
11	77 K/L lainnya	87.845.987,2	22.449.513,5	25,6%
	JUMLAH TOTAL	302.167.116,7	97.273.912,5	32,2%

Faktor yang mempengaruhi realisasi belanja barang adalah karena beberapa K/L telah melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya sejak awal tahun, seperti pada Kemenhan dimana realisasi belanja barang digunakan untuk penggelaran beberapa kegiatan operasi satgas. Pada Kemenkes, realisasi belanja barang digunakan dalam rangka mendukung penyaluran bantuan sosial pembayaran iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan bantuan pemerintah

A. Realisasi menurut Jenis Belanja

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Menurut Kelompok Akun (BKPK)

No	Kelompok Akun	Pagu (Rp.Juta)*	Realisasi (Rp.Juta)	%
1	5341 - Bel. Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.636.204,5	24.706.367,5	28,5%
2	5321 - Bel. Modal Peralatan dan Mesin	71.340.918,0	14.611.588,9	20,5%
3	5331 - Bel. Modal Gedung dan Bangunan	29.637.319,6	6.106.780,8	20,6%
4	5371 - Bel. Modal BLU	4.340.773,9	484.519,1	11,2%
5	5361 - Bel. Modal Lainnya	4.217.594,3	790.924,3	18,8%
6	5311 - Bel. Modal Tanah	4.149.010,2	788.226,6	19,0%
JUMLAH TOTAL		200.321.820,5	47.488.407,2	23,7%

Dari sisi penyerapan, secara nominal realisasi terbesar dicatat oleh Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp24,7 triliun atau mencapai 52,0% dari total realisasi belanja modal yang sebesar Rp47,5 triliun. Nominal realisasi terbesar berikutnya dicatat oleh Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp14,6 triliun. Secara persentase, tingkat realisasi tertinggi dicatat oleh Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu 28,5% dari pagu Rp86,6 triliun serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331) yaitu 20,6% dari pagu Rp29,6 triliun

REALISASI BELANJA NEGARA SEMESTER I – 2017

A. Realisasi menurut Jenis Belanja

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Menurut Bagian Anggaran (K/L)

No	K/L	Pagu (Rp.Juta)*	Realisasi (Rp.Juta)	%
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	79.094.654,1	23.326.987,7	29,5%
2	KEMENTERIAN PERTAHANAN	32.497.405,0	6.976.371,4	21,5%
3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	28.209.491,4	7.353.550,7	26,1%
4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	22.193.699,5	5.207.351,1	23,5%
5	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	4.226.600,9	317.816,0	7,5%
6	KEMENTERIAN AGAMA	4.006.315,5	794.831,2	19,8%
7	KEMENTERIAN KESEHATAN	3.470.733,4	431.770,4	12,4%
8	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.280.899,0	4.634,6	0,1%
9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.948.725,1	79.883,4	4,1%
10	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.878.972,2	167.067,1	8,9%
11	77 K/L lainnya	19.514.324,5	2.828.143,5	14,5%
JUMLAH TOTAL		200.321.820,5	47.488.407,2	23,7%

Tingginya realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan didorong oleh upaya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan seiring kebijakan pemerintah pusat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur konektivitas nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dua kementerian yang berkontribusi besar atas realisasi anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tersebut adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Pada Kementerian Perhubungan, realisasi terbesar adalah dalam rangka program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.

A. Realisasi menurut Jenis Belanja

Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bansos Menurut Kelompok Akun (BKPK)

No	Kelompok Akun	Pagu (Rp.Juta)*	Realisasi (Rp.Juta)	%
1	5721 - Bel. Bansos untuk Jaminan Sosial	35.833.612,9	17.489.073,3	48,8%
2	5741 - Bel. Bansos untuk Perlindungan Sosial	12.734.359,7	5.773.422,7	45,3%
3	5731 - Bel. Bansos untuk Pemberdayaan Sosial	2.608.324,9	1.301.467,0	49,9%
4	5751 - Bel. Bansos untuk Penanggulangan Kemiskinan	1.987.515,6	950.203,4	47,8%
5	5761 - Bel. Bansos untuk Penanggulangan Bencana	926.990,9	209.693,6	22,6%
6	5711 - Bel. Bansos untuk Rehabilitas Sosial	313.852,9	74.141,9	23,6%
JUMLAH TOTAL		54.404.656,8	25.798.001,8	47,4%

Dari sisi penyerapan, secara nominal realisasi terbesar dicatat oleh Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial yaitu sebesar Rp17,5 triliun atau mencapai 67,8% dari total realisasi belanja bansos sebesar Rp25,8 triliun. Nominal realisasi terbesar berikutnya dicatat oleh Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial sebesar Rp5,8 triliun. Secara persentase, tingkat realisasi tertinggi dicatat oleh Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial (5731) yaitu 49,9% dari pagu Rp2,6 triliun dan Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial yaitu 48,8% dari pagu Rp35,8 triliun

A. Realisasi menurut Jenis Belanja

Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bansos Menurut Bagian Anggaran (K/L)

No	K/L	Pagu (Rp.Juta)*	Realisasi (Rp.Juta)	%
1	KEMENTERIAN KESEHATAN	25.502.400,0	12.685.035,3	49,7%
2	KEMENTERIAN SOSIAL	13.873.815,4	6.529.192,4	47,1%
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9.288.501,8	4.427.083,7	47,7%
4	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	3.476.633,4	1.644.310,1	47,3%
5	KEMENTERIAN AGAMA	1.488.011,2	314.300,8	21,1%
6	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	775.000,0	198.079,5	25,6%
7	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	295,0	0,0	0,0%
JUMLAH TOTAL		54.404.656,8	25.798.001,8	47,4%

Kementerian Kesehatan merupakan K/L dengan nominal realisasi belanja bansos terbesar yaitu Rp12,7 triliun atau 49,2% dari total realisasi belanja bansos. Besarnya realisasi belanja bansos pada Kemenkes, terutama kelompok Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial, adalah didorong oleh pembayaran iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sedangkan tingginya tingkat realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial sebagian besar ditopang oleh realisasi pada Kementerian Sosial dalam rangka pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin terkait Program Keluarga Harapan.

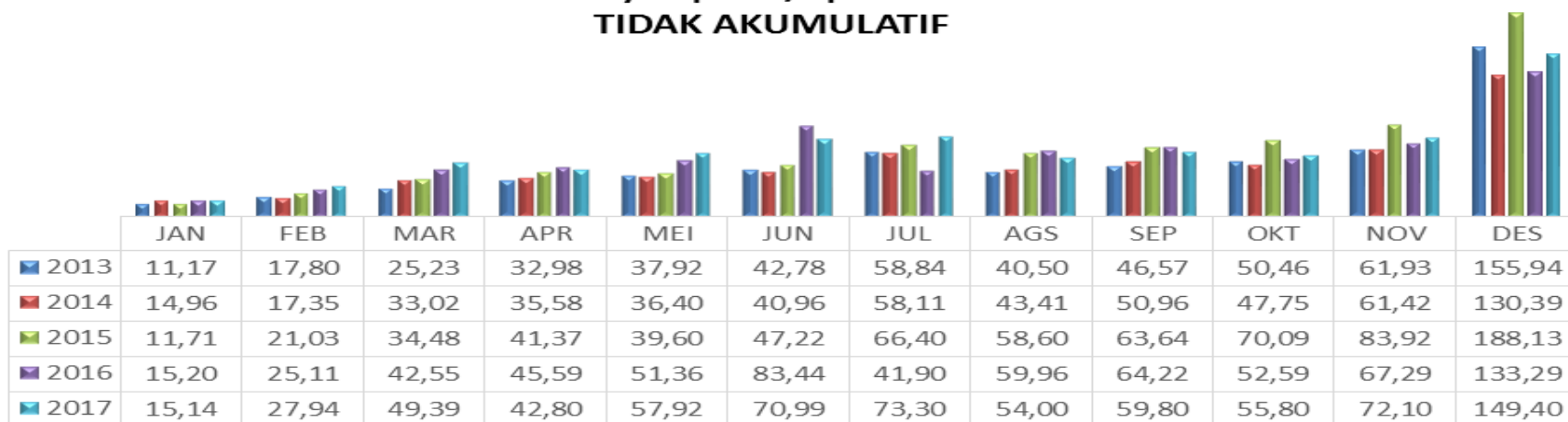
B. Realisasi Menurut Kategori Output

No	Kategori Output	Jumlah Output	Pagu* (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	% Realisasi
1	Operasional	203	302,6	118,9	39,3%
2	Pelayanan Publik/Tusi	2.550	206,8	64,9	31,4%
3	Infrastruktur	219	179,8	44,8	24,9%
4	Kesejahteraan Rakyat	134	82,6	35,3	42,7%
5	Cadangan/Tidak terdefinisi	143	4,3	0	0%
	TOTAL	3.249	776,1	264,0	34,0%

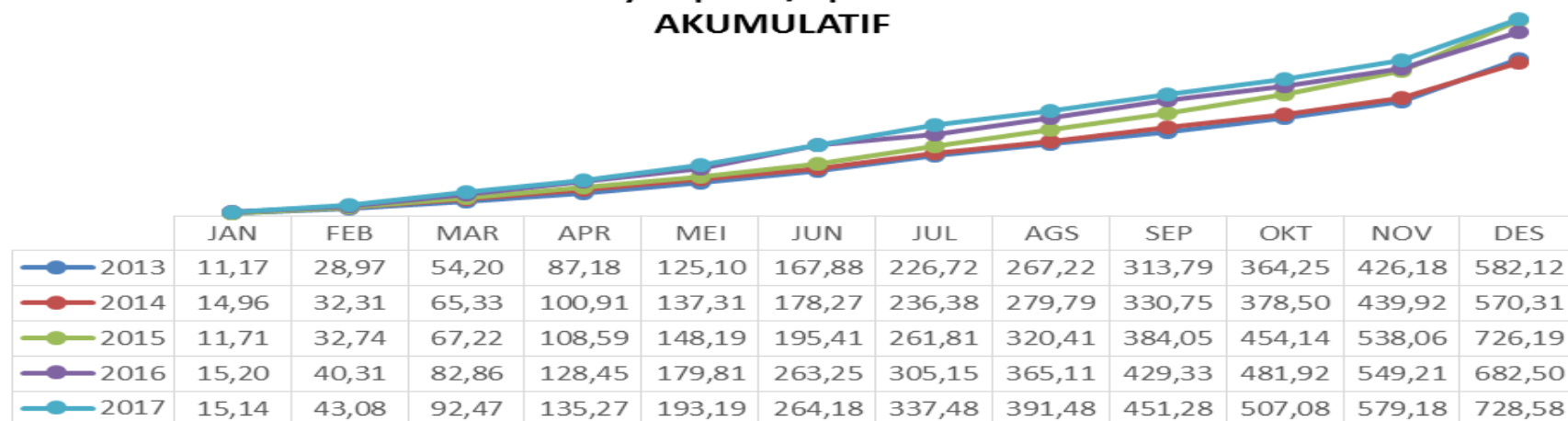
Tingkat realisasi menurut kategori output sampai tanggal 30 Juni 2017, secara persentase yang tertinggi dicatat oleh Kategori Output Kesejahteraan Rakyat sebesar 42,7% dari pagu Rp82,6 triliun dan selanjutnya Kategori Output Operasional sebesar 39,3% dari pagu Rp302,6 triliun. Secara nominal, realisasi tertinggi dicatat oleh kategori Output Operasional sebesar Rp118,9 triliun kemudian Output Pelayanan Publik sebesar Rp64,9 triliun. Kondisi realisasi masing-masing kategori output dituangkan pada bagian berikut ini.

PENYERAPAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013-2017 *)

**Penyerapan K/L per Bulan
TIDAK AKUMULATIF**



**Penyerapan K/L per Bulan
AKUMULATIF**

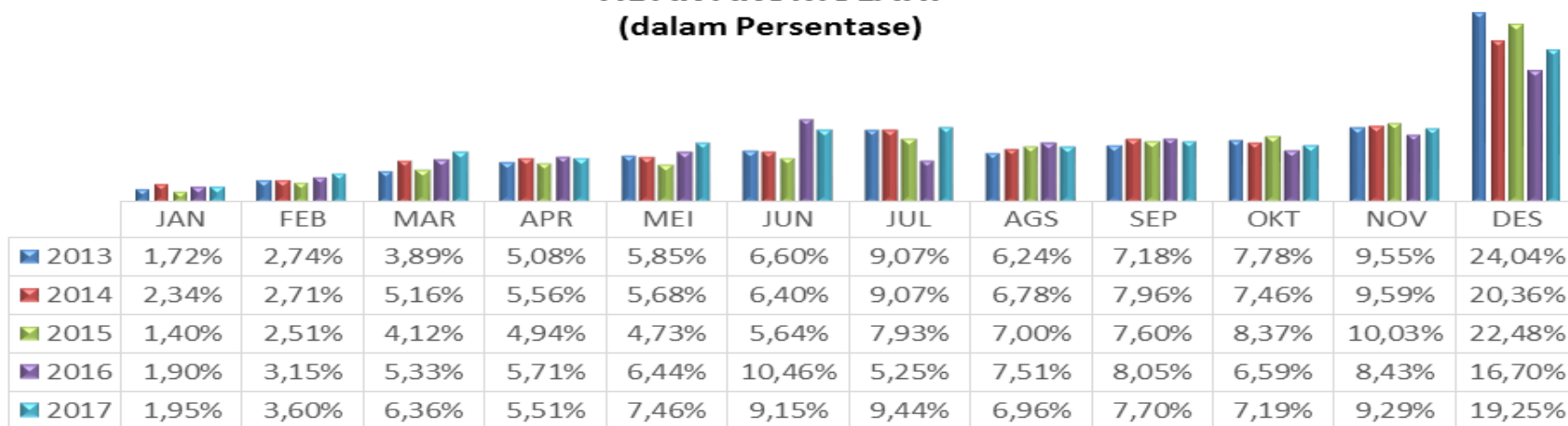


*) Penyerapan s.d. 30 Juni 2017, sedangkan bulan Juli s.d. Desember 2017 merupakan prognosis

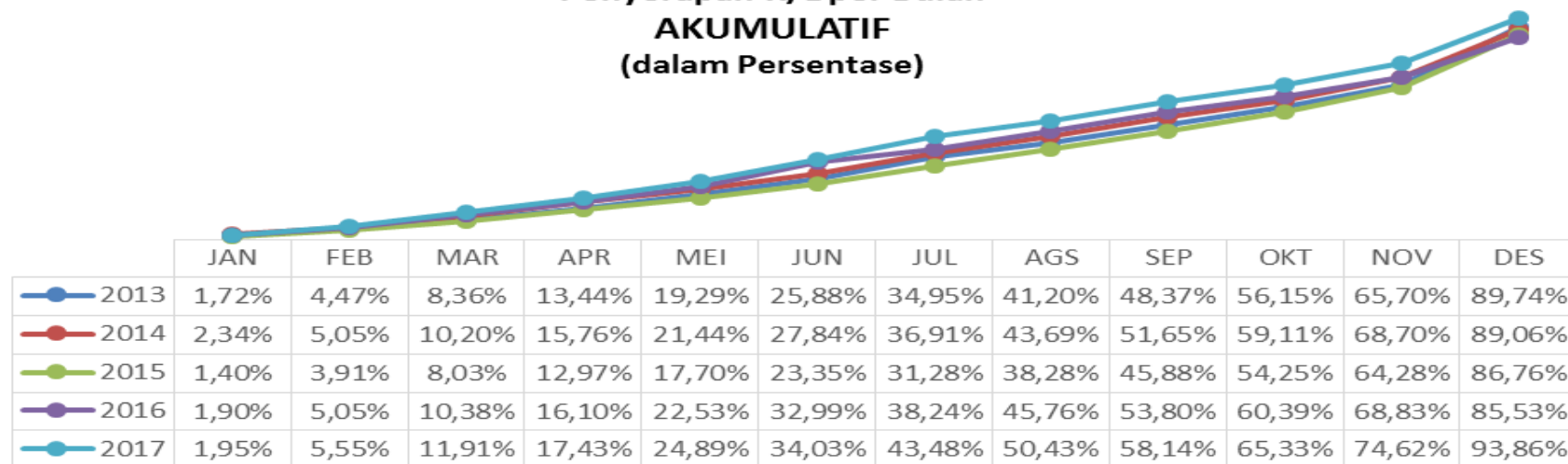
Secara rata-rata, umumnya penyerapan anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu meningkat pada triwulan ke IV.

PENYERAPAN JENIS BELANJA K/L DALAM PERSENTASE TAHUN 2013-2017 *)

**Penyerapan K/L per Bulan
TIDAK AKUMULATIF
(dalam Persentase)**



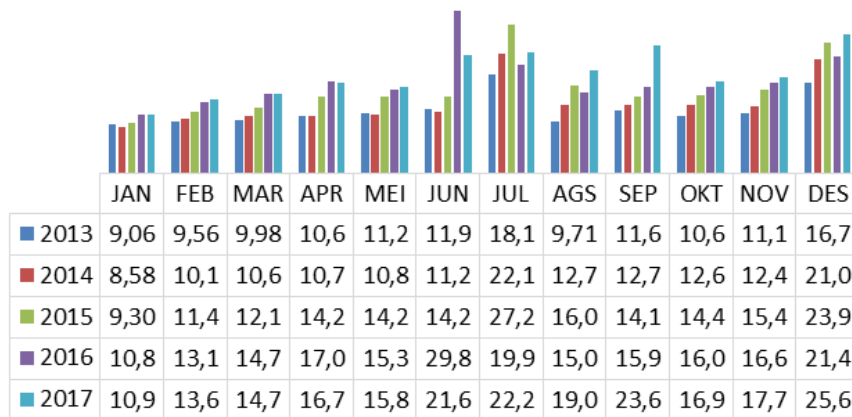
**Penyerapan K/L per Bulan
AKUMULATIF
(dalam Persentase)**



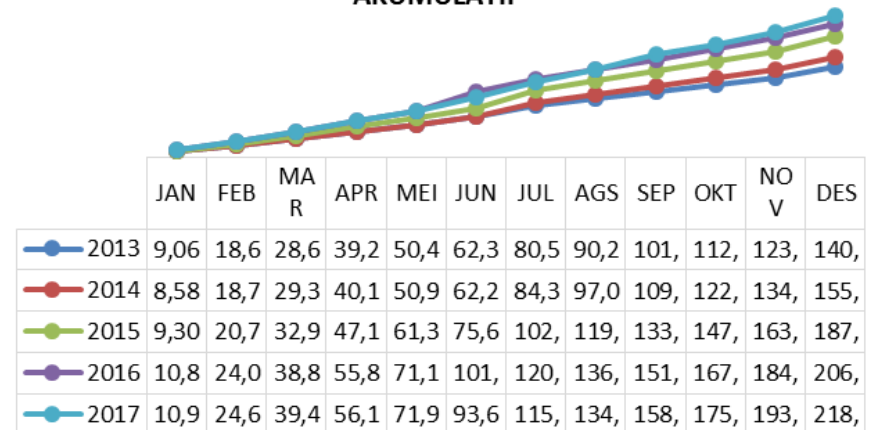
*) Penyerapan s.d. 30 Juni 2017 sedangkan bulan Juli s.d. Desember 2017 merupakan prognosis

PENYERAPAN BELANJA PEGAWAI K/L TAHUN 2013-2017 *)

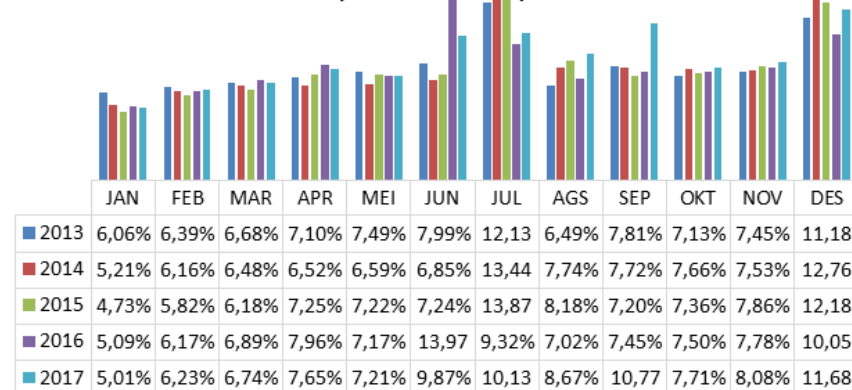
Penyerapan K/L per Bulan
TIDAK AKUMULATIF



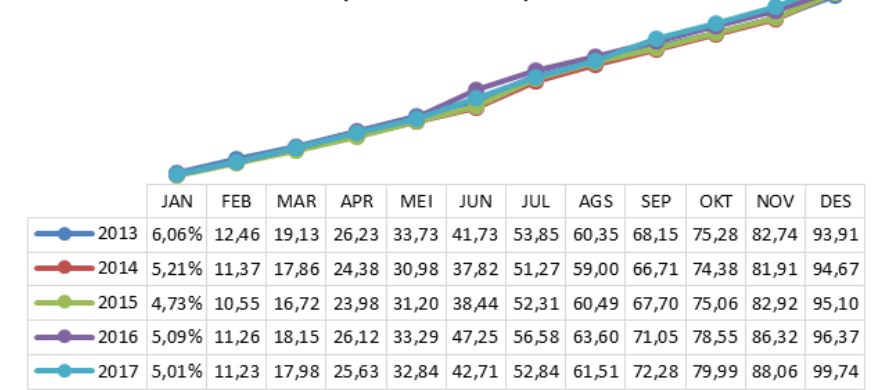
Penyerapan K/L per Bulan
AKUMULATIF



Penyerapan K/L per Bulan
TIDAK AKUMULATIF
(dalam Persentase)



Penyerapan K/L per Bulan
AKUMULATIF
(dalam Persentase)

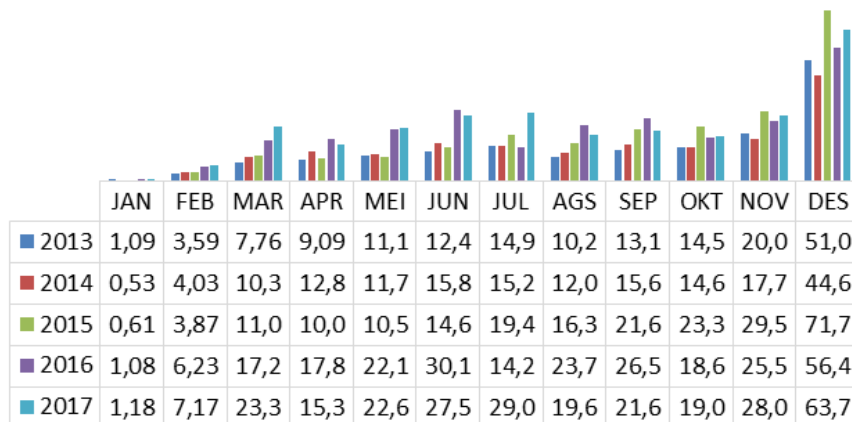


*) Penyerapan s.d. 30 Juni 2017 dan bulan Juli s.d. Desember 2017 merupakan prognosa

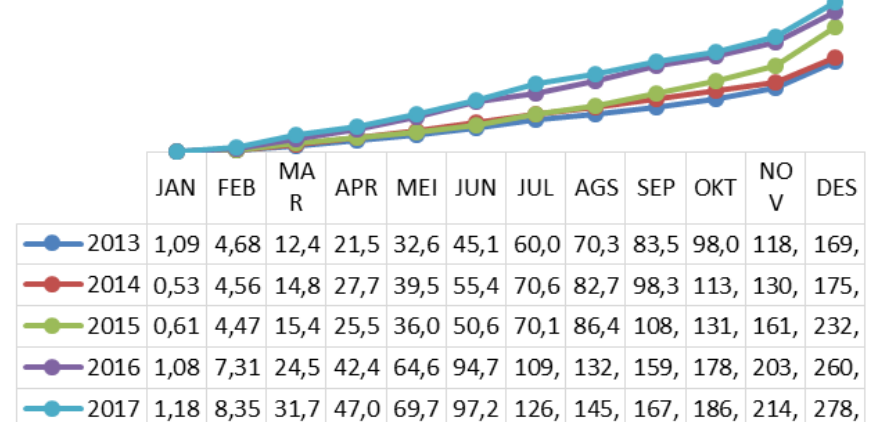
Penyerapan anggaran Belanja Pegawai dari tahun ke tahun mendekati sama setiap tahunnya. Persentase bulan Juli 2017 merupakan penyerapan tertinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya, hal ini disebabkan adanya pembayaran gaji ke 13.

PENYERAPAN BELANJA BARANG K/L TAHUN 2013-2017 *)

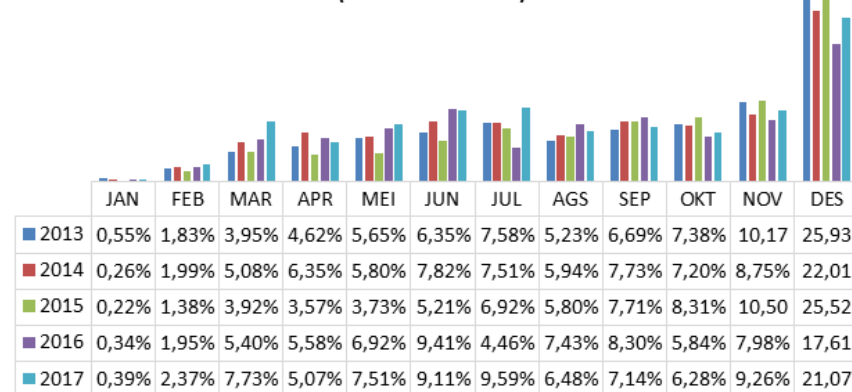
Penyerapan K/L per Bulan
TIDAK AKUMULATIF



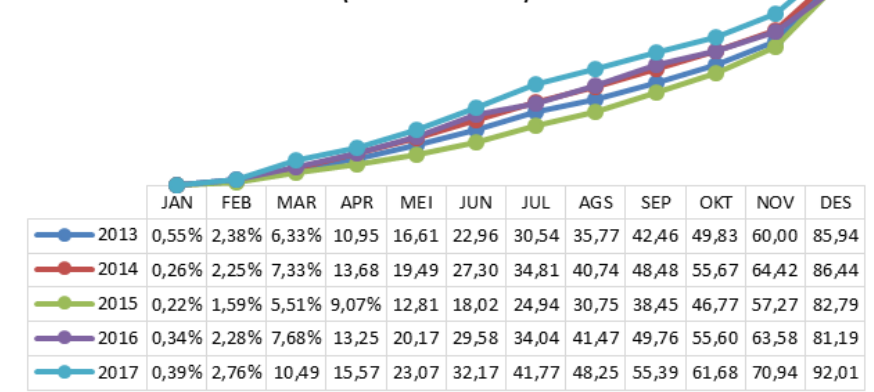
Penyerapan K/L per Bulan
AKUMULATIF



Penyerapan K/L per Bulan
TIDAK AKUMULATIF
(dalam Persentase)



Penyerapan K/L per Bulan
AKUMULATIF
(dalam Persentase)

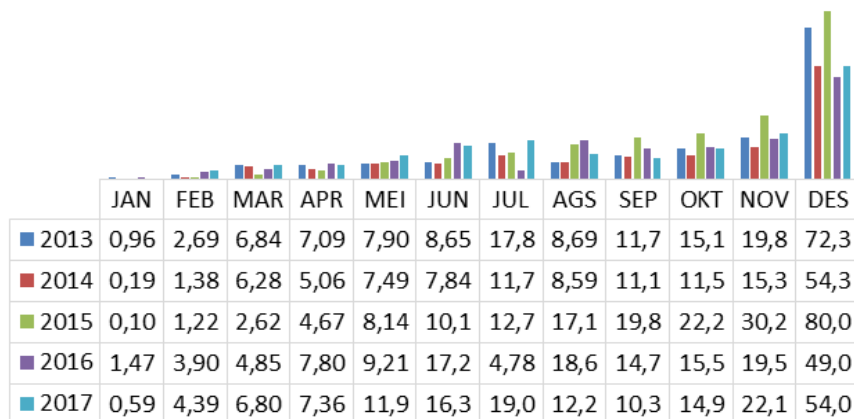


*) Penyerapan s.d. 30 Juni 2017 dan bulan Juli s.d Desember 2017 merupakan prognosis

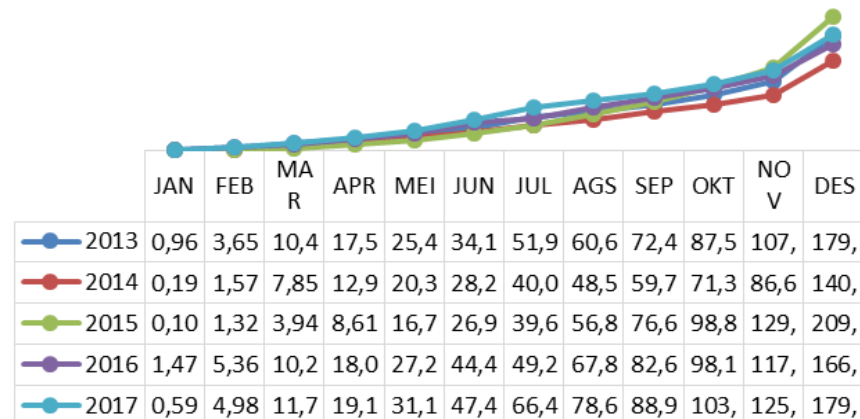
Penyerapan anggaran Belanja Barang menumpuk pada triwulan IV. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan adalah K/L belum melaksanakan kegiatan, dana masih diblokir dan revisi anggaran belum dilaksanakan.

PENYERAPAN BELANJA MODAL K/L TAHUN 2013-2017 *)

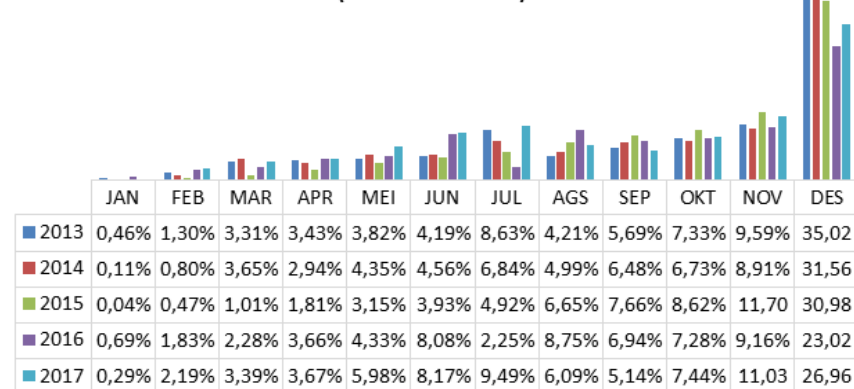
Penyerapan K/L per Bulan
TIDAK AKUMULATIF



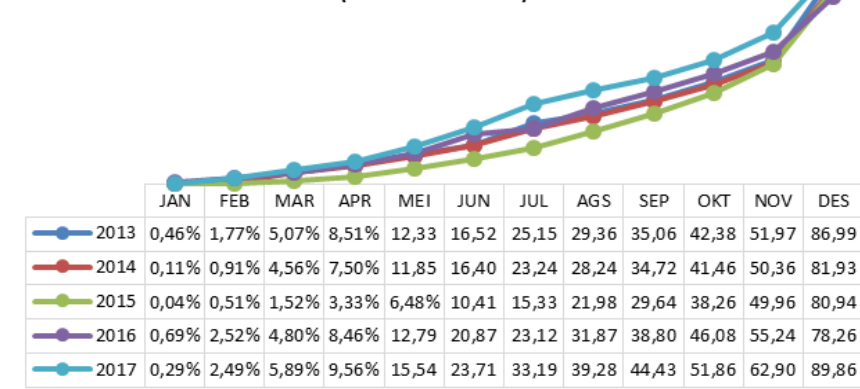
Penyerapan K/L per Bulan
AKUMULATIF



Penyerapan K/L per Bulan
TIDAK AKUMULATIF
(dalam Persentase)



Penyerapan K/L per Bulan
AKUMULATIF
(dalam Persentase)

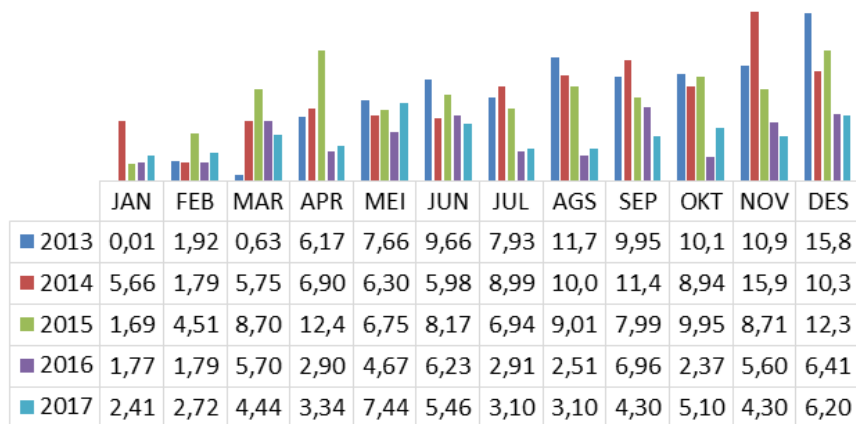


*) Penyerapan s.d. 30 Juni 2017 dan bulan Juli s.d. Desember 2017 merupakan prognosa

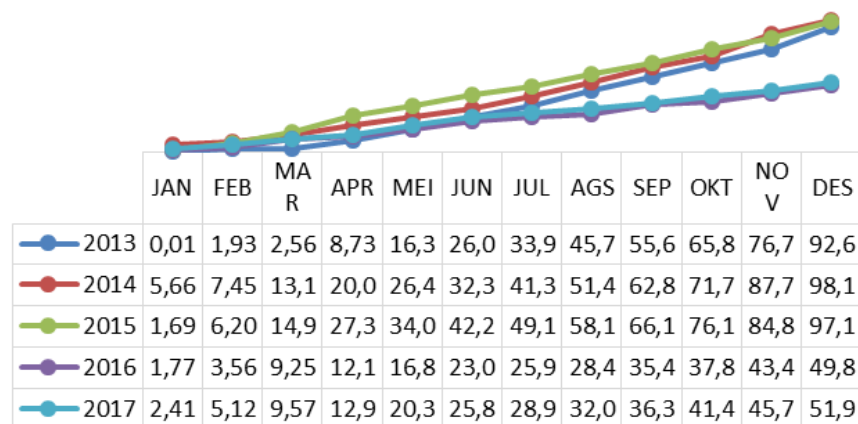
Serupa dengan pola penyerapan Belanja Barang, penyerapan anggaran Belanja Modal menumpuk pada triwulan ke IV. Ada beberapa kendala dalam proses Belanja Modal yang menyebabkan penyerapan anggarannya tidak ideal.

PENYERAPAN BELANJA BANTUAN SOSIAL K/L TAHUN 2013-2017 *)

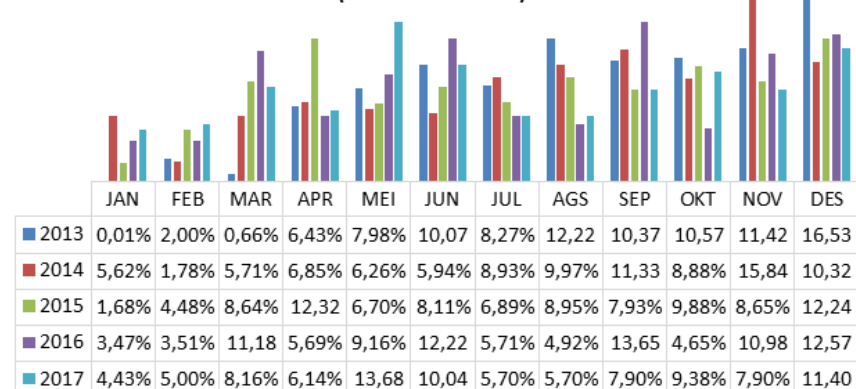
Penyerapan K/L per Bulan
TIDAK AKUMULATIF



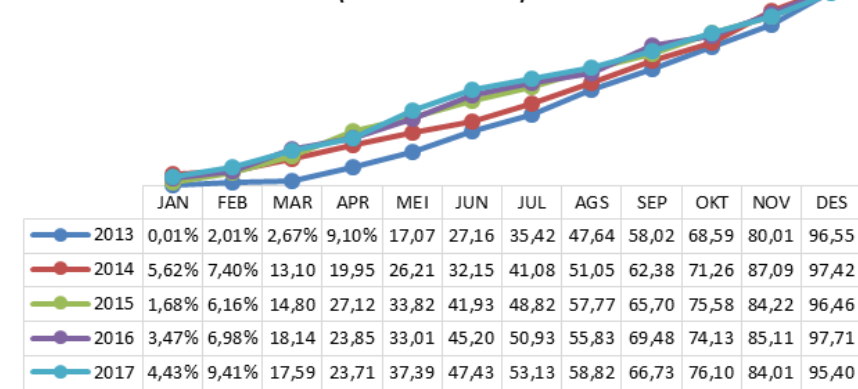
Penyerapan K/L per Bulan
AKUMULATIF



Penyerapan K/L per Bulan
TIDAK AKUMULATIF
(dalam Persentase)



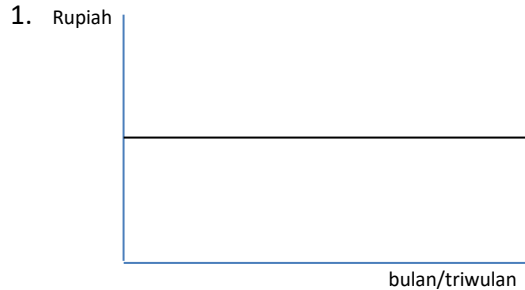
Penyerapan K/L per Bulan
AKUMULATIF
(dalam Persentase)



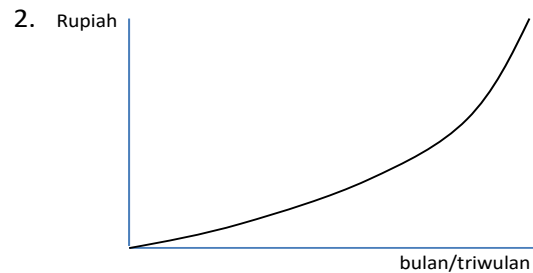
*) Penyerapan s.d. 30 Juni 2017 dan bulan Juli s.d. Desember 2017 merupakan prognosis

Penyerapan anggaran Belanja Bansos sejak tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan K/L non Kementerian Sosial mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial menjadi Belanja Barang Bantuan Pemerintah.

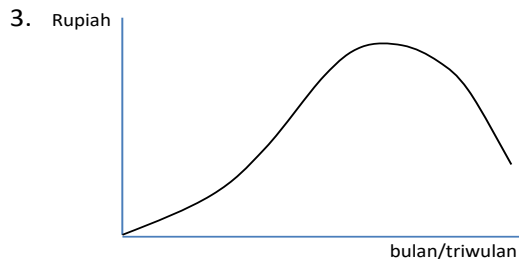
Pola Belanja Yang Ideal



Grafik no. 1, dapat terjadi pada pembayaran yang bersifat rutin seperti belanja gaji, honor, tunjangan, langganan daya dan jasa. Namun untuk pembayaran honor cenderung dibayarkan dalam beberapa bulan sekaligus atau saat-saat tertentu seperti saat menjelang hari raya. KPPN dan Kanwil dapat melakukan analisa trend pembayaran honor dan sejenisnya.



Grafik no.2, pola ini terjadi dari tahun ke tahun pada hampir semua jenis belanja dan hal ini kurang sehat ditinjau dari peran APBN sebagai instrumen *pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment*.



Grafik no.3, menunjukkan pola penarikan dana yang ideal karena dengan pola penarikan dana seperti ini **multiplier effect** dari belanja negara dapat segera dirasakan oleh masyarakat dan disamping itu dapat menggerakkan perekonomian nasional.

* grafik RPD tidak akumulatif

PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN



Institusional (Terkait dengan Manajemen dan Kelembagaan)



Struktural (Terkait dengan Kebijakan)



Kultural (Terkait dengan Kultur dan Kebiasaan)

Institusional (Terkait dengan Manajemen dan Kelembagaan)

- Keterlambatan penetapan SK Pejabat Pengelola Keuangan
- Keterlambatan penetapan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)
- Kendala dari internal K/L (terlambat terbitnya Juklak/Juknis dan atau menunggu instruksi/persetujuan dari kantor pusat K/L)
- Kurangnya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa

Struktural (Terkait dengan Kebijakan)

- Adanya blokir terhadap anggaran
- Perencanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kesalahan penentuan akun sehingga perlu revisi
- Adanya kebijakan penangguhan revisi anggaran karena adanya kebijakan penghematan/pemotongan belanja K/L
- Penundaan/keterlambatan/kegagalan proses lelang pengadaan barang dan jasa
- Reorganisasi Kementerian Negara/Lembaga pada tahun anggaran 2015

Kultural (Terkait dengan Kultur dan Kebiasaan)

- Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan masih bersifat formalitas dan tidak mencerminkan perencanaan atau kebutuhan sebenarnya
- Ketidaksiplinan pelaksanaan jadwal kegiatan antara rencana dan realisasi
- Keterbatasan pemahaman pejabat pengelola keuangan mengenai aturan mekanisme pembayaran APBN
- Kebiasaan dan etos kerja para pejabat pengelola keuangan yang cenderung bersikap berhati-hati dan berlebihan serta menunda pekerjaan pada batas waktu terakhir;
- Kebiasaan menunda kegiatan dan penyelesaian tagihan, termasuk dikarenakan rekanan tidak segera/terlambat mengajukan tagihan kepada satker dan/atau satker menumpuk pencairan sampai batas maksimal pencairan (triwulan akhir) sehingga pencairan dana menumpuk pada akhir tahun anggaran;
- Pola pikir satker yang kurang tanggap/concern dengan belanja pemerintah beserta dampak dan sisa anggarannya;
- Kurang cermatnya satker atau Kementerian/Lembaga dalam menyusun RKA-K/L.

UPAYA PEMERINTAH MENGATASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Melaksanakan penerbitan RKA-KL dan DIPA pada satu atap yaitu pada Direktorat Jenderal Anggaran sehingga diharapkan penyelesaian administrasi DIPA akan semakin cepat.
2. Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) yang dikoordinasikan oleh Tim Pengarah diketua oleh Menteri Keuangan, dan Sekretaris Kabinet sebagai Wakil Ketua, serta beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jaksa Agung, dan Kepala Staf Kepresidenan. TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
3. Kebijakan mengenai penyederhanaan persyaratan pencairan anggaran juga telah diatur oleh Pemerintah melalui PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

UPAYA PEMERINTAH MENGATASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN

4. Dalam rangka mendorong penyerapan belanja modal, Pemerintah telah menginisiasi perbaikan prosedur pengadaan barang dan jasa diantaranya dengan penerbitan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Pemerintah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 juga telah mengatur terkait proses pelelangan yang dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran dimulai, yaitu setelah RKA-KL disetujui oleh DPR (untuk pengadaan yang bersumber dari APBN) atau setelah APBD ditetapkan (untuk pengadaan yang bersumber dari APBD), dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Terkait pengadaan tanah untuk pembangunan, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dan PMK nomor 13/PMK.02/2013 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan terkait pengadaan tanah dalam proses pembangunan.

UPAYA PEMERINTAH MENGATASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN

8. Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bersifat *Multi Years Contract*, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penyempurnaan atas peraturan sebelumnya.
9. Untuk meningkatkan kualitas belanja negara baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan telah dan sedang mengembangkan *spending review* dengan tujuan untuk mereviu kualitas belanja dari sisi efisiensi maupun efektivitas.
10. Pemerintah juga telah memberikan akses data realisasi anggaran kepada Kementerian Negara/Lembaga sehingga dapat dipergunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggarannya

Langkah-Langkah Strategis TA 2017



PERENCANAAN



PENGADAAN BARANG DAN JASA



PELAKSANAAN ANGGARAN...



PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Langkah-Langkah Strategis TA 2017

PERENCANAAN



1. Meneliti kembali DIPA yang telah diterima, yakni:

- Memeriksa kesesuaian dengan Renja KL;
- Memeriksa apakah terdapat kesalahan administratif (kantor bayar, kode lokasi, akun, dll.) pada DIPA yang akan mempengaruhi proses pembayaran;

2. Segera mengajukan usulan revisi DIPA dalam hal hasil penelitian yang dilakukan memerlukan penyesuaian/perbaikan dalam DIPA.

3. Dalam hal masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (a.l. blokir), segera mempersiapkan dokumen (TOR, RAB, dll) yang diperlukan untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA tersebut;

Langkah-Langkah Strategis TA 2017

PENGADAAN BARANG DAN JASA

1) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diantaranya:

- Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan dan menyiapkan jadwal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana kegiatan.
- Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa (pelelangan) paling lambat bulan Maret 2017.
- Melaksanakan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement*.

2) Melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa yang nilai paket pekerjaannya dibawah 200 juta pada seluruh Satker.

3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa.



Langkah-Langkah Strategis TA 2017

PELAKSANAAN ANGGARAN...

1) Segera menetapkan Pejabat Perbendaharaan, terutama untuk K/L baru serta Satker Tugas Pembantuan.

2) Segera menetapkan target penyerapan dan pencapaian output untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan.

3) Segera menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.



Langkah-Langkah Strategis TA 2017

PELAKSANAAN ANGGARAN... (2)

4) Melakukan reviu atas Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Rencana Penerimaan Dana yang telah tertuang dalam DIPA TA 2016 dan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi terkini dengan berpedoman pada PMK Nomor 277/PMK.05/2014 dalam rangka:

- memperbaiki informasi RPD dan Rencana Penerimaan Dana yang tercantum dalam DIPA;
- memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja; dan

5) Mempercepat proses verifikasi dan tahapan penyaluran bantuan sosial atau bantuan pemerintah.

6) Menginstruksikan agar Satker segera menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

7) Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan antara lain dengan membuat *routing slip* pada setiap tagihan.



Langkah-Langkah Strategis TA 2017

PELAKSANAAN ANGGARAN... (3)

8) Agar memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran.

9) Selalu berkoordinasi dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses pembayaran

10) Meningkatkan kualitas penarikan dana dengan segera menetapkan pelaksanaan program dan kegiatan

11) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan APBN



Langkah-Langkah Strategis TA 2017

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1) Meningkatkan peran APIP K/L dalam:

- proses perencanaan anggaran;
- proses pelaksanaan anggaran; dan
- proses pertanggungjawaban anggaran.

2) Menjadikan APIP K/L sebagai mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban.



STRATEGI PENGENDALIAN BELANJA SEMESTER II TAHUN 2017

1. Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi s.d 30 Juni	Rencana Penarikan Hal. III DIPA (Rp.Triliun)						
				Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	TOTAL
1	51 - Pegawai	219,2	93,6	22,2	19,0	23,6	14,0	18,7	19,6	117,0
2	52 - Barang	302,2	97,1	33,2	32,9	34,9	35,3	37,4	45,0	218,7
3	53 - Modal	200,3	47,5	18,1	20,3	22,5	19,0	23,3	51,1	154,2
4	57 - Bansos	54,4	25,7	5,1	6,1	4,3	7,4	7,8	8,5	39,1
Total Belanja		776,1	263,9	78,6	78,3	85,3	75,6	87,2	124,2	529,0

Berdasarkan data Halaman III DIPA, total rencana penarikan dana di Semester II adalah sebesar Rp529,0 triliun. Apabila dijumlahkan antara nilai total realisasi belanja sampai 30 Juni 2017 sebesar Rp263,9 triliun dengan nilai total rencana penarikan Hal. III DIPA periode Semester II – 2017 sebesar Rp529,0 triliun maka jumlah total realisasi belanja K/L tahun 2017 menjadi sebesar Rp792,9 triliun. Angka Rp792,9 triliun ini melebihi pagu DIPA (pagu berjalan) yang sebesar Rp776,1 triliun maupun pagu APBN yang sebesar Rp763,6 triliun, dimana hal ini terjadi karena Satker K/L tidak melakukan *updating* data atau revisi Halaman III DIPA setelah realisasi belanja secara rutin khususnya terhadap data rencana penarikan untuk bulan Januari s.d Juni 2017

STRATEGI PENGENDALIAN BELANJA SEMESTER II TAHUN 2017

2. Data Kontrak

Tabel III 2 Data Batas Akhir **Kontrak Belanja Barang** Menurut Kategori Nilai Kontrak

Batas Akhir Kontrak	Jenis Belanja	s.d 5 M		5 M - 10 M		10 M - 50 M		50 M - 100 M		> 100 M	
		JML	Nilai	JML	Nilai	JML	Nilai	JML	Nilai	JML	Nilai
31 Juli	52	3.782	1.288,3	56	390,8	26	432,0	-	0,0	1	291,7
31 Agust	52	2.437	1.320,8	72	495,0	53	952,5	-	0,0	-	0,0
30 Sept	52	1.585	958,1	47	321,0	36	779,7	4	231,6	1	264,7
31 Okt	52	1.750	1.146,1	115	815,0	58	1.149,2	7	438,3	2	445,1
30 Nov	52	2.214	1.443,6	74	521,7	55	1.232,0	4	255,6	1	636,6
31 Des	52	9.845	5.826,9	429	2.982,3	183	3.325,9	12	813,1	9	3.511,4
TOTAL		37.827	20.905,8	1.579	11.141,9	1.710	37.820,0	341	24.712,5	123	24.033,7

Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, baik jumlah dokumen kontrak maupun nilai kontrak belanja barang untuk seluruh kategori pagu kontrak, yang terbanyak adalah kontrak-kontrak yang jatuh tempo batas akhir penyelesaian kontrak pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember 2017, yaitu total sebanyak 10.478 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp16,46 triliun

STRATEGI PENGENDALIAN BELANJA SEMESTER II TAHUN 2017

2. Data Kontrak

Data Batas Akhir **Kontrak Belanja Modal** Menurut Kategori Nilai Kontrak

Batas Akhir Kontrak	Jenis Belanja	s.d 5 M		5 M - 10 M		10 M - 50 M		50 M - 100 M		> 100 M	
		JML	Nilai	JML	Nilai	JML	Nilai	JML	Nilai	JML	Nilai
31 Juli	53	2.327	1.395,5	73	506,2	53	1.119,4	8	559,5	5	847,2
31 Agust	53	1.791	1.487,4	120	859,2	87	1.608,7	19	1.383,2	14	3.655,1
30 Sept	53	1.598	1.738,1	140	986,4	153	3.432,3	39	2.986,0	11	1.901,2
31 Okt	53	1.329	1.435,3	172	1.232,0	197	4.374,4	40	2.852,9	9	1.638,4
30 Nov	53	1.016	1.317,5	165	1.199,4	257	5.777,4	73	5.607,8	16	2.630,7
31 Des	53	1.680	2.348,4	247	1.795,3	664	16.148,9	165	11.890,2	65	10.709,7
TOTAL		9.741	9.722,2	917	6.578,5	1.411	32.461,2	344	25.279,5	120	21.382,2

Tidak berbeda dengan kondisi batas akhir penyelesaian kontrak-kontrak jenis belanja barang, untuk kontrak belanja modal juga terkonsentrasi pada akhir bulan Desember 2017, yaitu sebanyak 2.821 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp42,89 triliun.

Berdasarkan kondisi periode batas akhir penyelesaian kontrak belanja barang dan belanja modal tersebut, perlu diantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan proyek/pekerjaan tidak selesai tepat waktu terutama untuk kontrak yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Karena apabila terjadi kendala yang mengakibatkan penyelesaian kontrak mundur dari target waktunya maka akan membebani belanja pemerintah di tahun anggaran berikutnya

STRATEGI PENGENDALIAN BELANJA SEMESTER II TAHUN 2017

3. Proyeksi Semester II – 2017

Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi s.d Juni	% Realisasi s.d Juni	Rencana Penyerapan Semester II - 2017							Proyeksi Total Realisasi	% Total Realisasi	Sisa
				Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total			
Pegawai	219,2	93,6	42,7%	22,2	19,0	23,6	16,9	17,7	25,6	125,0	218,6	99,7%	0,6
Barang	302,2	97,1	32,1%	29,0	19,6	21,6	19,0	28,0	63,7	180,9	278,0	92,0%	24,2
Modal	200,3	47,5	23,7%	19,0	12,2	10,3	14,9	22,1	54,0	132,5	180,0	89,8%	20,3
Bansos	54,4	25,7	47,2%	3,1	3,1	4,3	5,1	4,3	6,2	26,0	51,7	95,0%	2,7
TOTAL	776,1	263,9	34,0%	73,3	54,0	59,8	55,8	72,1	149,4	464,4	728,3	93,84%	47,8

Realisasi total sampai akhir tahun 2017 diperkirakan sebesar **Rp728,3 triliun** atau 93,84% dari pagu berjalan (pagu DIPA 2017) sebesar Rp776,1 triliun. Realisasi tertinggi diperkirakan terjadi pada belanja pegawai yaitu mencapai 99,7%. Belanja modal diperkirakan terealisasi di kisaran 89,8% sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp20,3 triliun.

TERIMA KASIH